

PERAN KEPEMIMPINAN ETNIK DALAM MERAWAT HUBUNGAN ANTARA ETNIK DAYAK DAN ETNIK MELAYU DI KALIMANTAN BARAT

Author
Maisondra

Affiliation
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email
maisondra@ipdn.ac.id

Received: September, 14, 2022
Revised: Nov 23, 2022
Accepted: Nov 23, 2022
Available Online: Des 01, 2022

Corresponding author
Maisondra
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
maisondra@ipdn.ac.id

Abstrak

Dua etnik besar sekaligus etnik yang dianggap asli sebagai penghuni daerah Propinsi Kalimantan Barat dan sekitarnya juga sering terlibat dalam konflik sosial yang terjadi selama ini. Umumnya kedua suku ini berkonflik dengan etnik pendatang, dan sangat jarang sekali terjadi kedua etnik ini saling berkonflik. Meskipun sering terjadi pertikaian kecil antara orang dari kedua etnik ini, tapi umumnya akan dapat diredam dan tidak berlanjut pada konflik sosial berskala besar. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal apa yang menyebabkan kedua suku ini dapat hidup berdampingan secara rukun dalam kurun waktu yang lama. Dengan teori Konflik (Emile Durkheim) dan Teori Struktural Fungsional (Karl Marx), serta menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif, peneliti berhasil mendeskripsikan bagaimana hal ini bisa terjadi, dan bisa dijadikan contoh untuk suatu persaudaraan yang berbeda etnik namun dapat hidup berdampingan secara rukun dalam kurun waktu yang Panjang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Adanya harmonisasi hubungan antara etnik Dayak dan etnik Melayu yang terbina sejak lama yang tak lepas dari peran pemimpin ke dua etnik, Ke dua pemimpin etnik ini juga terlibat aktif dalam penyelesaian setiap pertikaian kecil dan konflik yang terjadi serta adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh ke dua pemimpin etnik untuk menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis di tanah Kalimantan Barat.

Kata Kunci: Peran, Kepemimpinan Etnik, Merawat Hubungan

Abstract

Two major ethnic groups as well as ethnic groups that are considered native as Province of West Kalimantan and its surroundings are also often involved in social conflicts that have occurred so far. In general, these two ethnic groups are in conflict with immigrant ethnic groups, and it is very rare for these two ethnic groups to conflict with each other. Although there are often minor clashes between people from these two ethnicities, they can generally be suppressed and do not lead to large-scale social conflicts. The purpose of this study is to find out what causes these two tribes to coexist in harmony for a long time. With Conflict theory (Emile Durkheim) and Structural-Functional Theory (Karl Marx), as well as using a qualitative descriptive research type, the researcher succeeded in describing how this could happen, and could be used as an example for a different ethnic brotherhood but could coexist in harmony within the long time. The results of this study indicate that: There is harmonization of the relationship between the Dayak ethnicity and the Malay ethnicity which has been fostered for a long time which cannot be separated from the roles of the leaders of the two ethnic groups. The two ethnic

leaders are also actively involved in resolving every small dispute and conflict that occurs and there are efforts the efforts made by the two ethnic leaders to create a peaceful and harmonious life in the land of West Kalimantan.

Keywords: *Role, Ethnic Leadership, Maintaining Relationships*

PENDAHULUAN

Propinsi Kalimantan Barat dengan wilayah seluas 146.807 Km², di tahun 2020, didiami oleh 4,3 juta penduduk dari lebih 50 etnik yang berbeda. Etnik terbesar adalah: Dayak (40 persen) dan Melayu (28 persen) sebagai etnik asli dan utama. Kemudian, suku terbesar lainnya adalah Jawa (8,6 persen), China (8,2) dan Madura (6,2 persen) sebagai suku terbesar berikutnya. Di Propinsi Kalimantan Barat juga hidup secara berdampingan multi agama, Islam (60 persen), Kristen/Protestan (30 persen), Budha, Hindu dan lainnya sekitar (10 persen). Multi etnik dan multi agama ini hidup membaaur dalam aktifitas sehari- hari yang sibuk dan padat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Propinsi Kalimantan Barat, 2020, kepadatan penduduknya baru 30 jiwa perkilometer persegi, sementara laju pertumbuhan penduduk 1,45%, dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menjadikan Propinsi Kalimantan Barat menjadi pilihan untuk didatangi masyarakat dari seluruh wilayah Indonesia. Masyarakat Kalimantan Barat adalah masyarakat yang terbuka terhadap kedatangan orang-orang yang ingin mencari kehidupan dan berdomisili di daerahnya. Dapat dikatakan, sekitar 32 persen penduduk Propinsi Kalimantan Barat adalah bukan penduduk asli (pendatang), yang datang secara bertahap sejak puluhan tahun yang lalu.

Di samping itu, dapat dikatakan tingkat pendidikan, kesehatan, dan

kesejahteraan masyarakatnya masih tergolong rendah. Indeks Pembangunan Manusianya (IPM), adalah 66.26, di bawah angka IPM nasional 70,89. Nilai ini menempatkan Propinsi Kalimantan Barat di nomor 29 dari 33 propinsi di Indonesia. Nilai pembangunan wilayahnya juga masih kurang, dapat dilihat dari banyaknya lahan-lahan yang belum terisi dan dimanfaatkan secara maksimal, bukan saja di pedesaan tetapi juga di kota- kota besar termasuk kota Pontianak sebagai Ibu Kota Propinsi.

Kondisi di atas menjadikan Propinsi Kalimantan barat sebagai: 1) Daerah yang didatangi untuk mencari kehidupan bagi pendatang hampir dari seluruh daerah di Indonesia, 2) Daerah yang rawan akan konflik, terutama konflik etnik, baik yang berskala kecil maupun besar. Sejarah telah mencatat, telah terjadi belasan konflik etnik sejak tahun 1930an. Dalam situasi multi etnik dan agama yang rawan akan konflik ini, menjadikan peran kepemimpinan kelompok masing-masing etnik menjadi besar, terutama dalam merawat hubungan dan mencegah serta menyelesaikan perselisihan atau konflik yang terjadi.

Menurut pengamatan peneliti selama hampir 2 tahun berada di wilayah Kalimantan Barat, kerukunan hidup antar etnik dan umat beragama yang berbeda cukup baik dan terus mengalami peningkatan, walaupun masih ada terjadi perselisihan-perselisihan kecil yang segera dapat diselesaikan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kepemimpinan

kelompok atau tokoh masing-masing etniklah yang berperan lebih besar dalam menyelesaikan perselisihan tersebut. Pihak keamanan (polisi) akan menjadi koordinator dalam penyelesaian bersama-sama masing-masing pemimpin etnik. Penyelesaian yang melibatkan pemimpin atau tokoh etnik berlangsung lebih cepat dan mengakar.

Sebagaimana dikatakan di atas bahwa 2 etnik besar sekaligus etnik yang dianggap asli sebagai penghuni daerah Propinsi Kalimantan Barat dan sekitarnya juga sering terlibat dalam konflik sosial yang terjadi selama ini. Umumnya kedua suku ini berkonflik dengan etnik pendatang, dan sangat jarang sekali terjadi kedua etnik ini saling berkonflik. Meskipun sering terjadi pertikaian kecil antara orang dari kedua etnik ini, tapi umumnya akan dapat diredam dan tidak berlanjut pada konflik sosial berskala besar. Penelitian kecil ini mencoba mengungkap bagaimana hal ini bisa terjadi atau hal apa yang menyebabkan kedua etnik besar dan asli ini dapat hidup berdampingan secara rukun dalam kurun waktu yang lama, dan bisa dijadikan contoh untuk suatu persaudaraan yang berbeda etnik namun dapat hidup rukun secara berdampingan.

KAJIAN TEORI

Teori Struktural Fungsional (*Emile Durkheim dan Auguste Comte*)

Teori ini melihat masyarakat sebagai sebuah keseluruhan sistem yang bekerja untuk menciptakan tatanan dan stabilitas sosial sehingga masyarakat dapat hidup harmonis. Masyarakat adalah sebagaimana organisme yang tersusun atas beberapa komponen yang memainkan peranannya masing-masing. Apabila

masing-masing komponen bergerak sendiri, organisme akan mengalami disfungsi, institusi sosial (keluarga, pemerintah, agama, ekonomi, dan sebagainya) akan lenyap dengan sendirinya, maka sistem sosial akan *collapse*, (Avruch Kevin 2000) .

Dua tokoh yang mendukung teori ini adalah Talcott Parsons dan Robert K. Merton.

Teori Konflik (Karl Marx, 1950-an)

Teori ini muncul sebagai reaksi (*antitesis*) dan alternatif atas teori Struktural Fungsional. Teori ini memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda. Di dalam masyarakat tidak akan selamanya berada pada keteraturan. Buktinya dalam masyarakat manapun pasti pernah mengalami konflik-konflik atau ketegangan-ketegangan.

Teori konflik melihat adanya dominasi, koersi, dan kekuasaan dalam masyarakat, serta juga membicarakan mengenai otoritas yang berbeda-beda. Otoritas yang berbeda-beda ini menghasilkan superordinasi dan subordinasi. Perbedaan antara superordinasi dan subordinasi dapat menimbulkan konflik karena adanya perbedaan kepentingan dengan kondisi semula, (Avruch Kevin 2000).

Dua tokoh sosiologi modern yang berorientasi serta menjadikan sebagai dasar pemikiran pada teori konflik, yaitu Lewis A Coser dan Ralf Dah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif, yakni suatu

proses pemahaman analitis berdasarkan metodologi yang digunakan untuk menyelidiki suatu situasi tentang fenomena konflik antar kelompok sosial dan pengelolanya. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran yang kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan informan, dan melakukan studi pada situasi sosial yang alami (Bungin, 2007:69).

Peneliti sudah mempersiapkan bekal teori dan wawasan yang cukup berkaitan dengan persoalan yang diteliti, sehingga bisa dapat dikembangkan secara terarah dan sistematis baik dalam bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas.

Menurut (Nawawi, 1989:72) penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia, dalam hal ini yang berhubungan dengan konflik dan keharmonisan sosial. Fenomena itu berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya dalam hubungan antar etnik yang diteliti. Jadi, penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan ini berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung terkait dengan konflik dan keharmonisan hubungan antar etnik di dalam lingkungan penelitian.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara semi terstruktur dilakukan terhadap *stakeholders* yakni pemimpin etnik kedua suku (Dayak

dan Melayu), pakar tentang konflik dari Universitas Tanjung Pura dan anggota masyarakat lainnya. Observasi partisipatif dilakukan selama 2 tahun dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan dengan mencatat segala gejala yang ditemui secara sistematis, dengan tujuan agar memberikan gambaran realistik tentang suatu perilaku atau kejadian yang berkaitan dengan objek penelitian. Sedangkan metode dokumentasi dilakukan untuk memperkuat hasil penelitian dengan cara perolehan informasi dari catatan penting lembaga dan perorangan termasuk buku, jurnal, internet dan publikasi instansi pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Harmonisasi Hubungan Antara Etnik Dayak Dengan Etnik Melayu

Secara umum dapat dikatakan, penduduk asli Propinsi Kalimantan Barat yakni etnik Dayak dan etnik Melayu adalah masyarakat yang terbuka terhadap para pendatang yang ingin mencari kehidupan dan berdomisil di wilayah Kalimantan Barat, baik di daerah perkotaan sampai ke desa-desa. Sehingga saat ini dapat ditemui sejumlah pendatang yang membuka usaha dan memiliki lahan yang luas-luas di wilayah Propinsi Kalimantan Barat tanpa mendapat gangguan dari ke dua etnik tersebut. Begitu juga dalam pemerintahan dan kepemimpinan di tengah-tengah masyarakat, di samping dari kedua etnik terbesar tersebut juga sudah banyak muncul dari etnik lain, seperti dari etnik Jawa, Tionghoa dan Madura. Di beberapa daerah, ada yang kepala atau wakil kepala daerahnya bukan dari etnik Dayak atau Melayu. Begitu juga sudah banyak etnik lain yang duduk di Dewan Perwakilan Daerah (parlemen daerah).

Harmonisasi yang utama adalah harmonisnya hubungan dua etnik asli, sekaligus menjadi etnik terbesar, yakni etnik Dayak dan Melayu. Keharmonisan hubungan kedua etnik ini sudah berlangsung semenjak lama, meskipun mereka memiliki perbedaan yang mendasar, seperti berbeda budaya dan agamanya. Perbedaan ini hampir tidak pernah menjadi pemicu konflik atau kerusuhan lainnya. Kerukunan hidup beragama sangat baik, dimana dapat dilihat banyak rumah ibadah beda agama yang saling berdampingan. Ini tidak lepas dari peran pemimpin atau tokoh dari kedua etnik yang senantiasa terus berusaha menanamkan nilai-nilai persaudaraan kedua etnik tersebut. Pengaruh dari pemimpin atau tokoh kedua etnik besar dan asli ini yang sangat besar, menjadikan mereka sebagai tokoh yang dihormati semua kalangan etnik.

Harmonisasi hubungan masyarakat secara umum dapat dikatakan sudah cukup baik dengan diperlakukannya masyarakat pendatang secara sama dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam dunia usaha, kegiatan keagamaan, berbagai organisasi dan pemerintahan. Penduduk asli, yakni etnik Dayak dan Melayu telah menerima dengan tangan terbuka dan lapang dada.

Harmonisnya hubungan antara etnik Dayak dan etnik Melayu sudah berlangsung semenjak dahulu secara turun temurun. Pemimpin dan tokoh dari kedua etnik tersebut telah dan selalu mewarisi jiwa dan semangat kerukunan antar kedua etnik ini. Jika ada terjadi perselisihan antara kedua etnik ini, maka pemimpin atau tokoh masyarakat dari kedua etnik akan turun mendamaikan dengan semangat persaudaraan. Kedua pemimpin dari kedua etnik akan saling mengajari dan memarahi anggota kelompoknya yang bersengketa,

dan tidak saling menegakkan kebenaran. Jadi, teramat sulit rasanya untuk mengadu domba antara kedua etnik ini.

Harmonisasi hubungan antara etnik Dayak dan Melayu, lebih didasarkan pada faktor sejarah, dimana mereka sama-sama sebagai etnik asli, dan sejarah sama-sama pernah berkonflik dengan etnik pendatang. Jadi dasar harmonisasi mereka bukan didasarkan pada hal yang lebih prinsip, yaitu budaya dan agama. Budaya dan agama mereka berbeda, namun faktor ini mampu dikesampingkan demi toleransi dan kerjasama antar kedua etnik tersebut.

Harmonisasi tersebut ditambah dengan faktor banyaknya berpindah agama etnik Dayak menjadi Islam, terutama oleh sebab perkawinan. Orang-orang Etnik Melayu adalah penganut Islam yang teguh dan taat, sehingga Etnik Melayu identik dengan Islam. Oleh karenanya, ketika ada orang dari etnik Dayak yang berpindah keyakinan memeluk Islam, maka mereka cenderung menyebutnya dengan istilah “masuk Melayu”, bukan dengan istilah “masuk Islam”.

Keharmonisan kedua suku ini juga terlihat dari sejarah kerajaan atau kesultanan yang ada di wilayah Kalimantan barat, dimana semua kesultanan adalah Kesultanan Islam dari kalangan etnik Melayu. Tidaka ada satupun kerajaan etnik Dayak. Sebagian ahli ada yang berpendapat bahwa Etnik Dayak adalah etnik Melayu yang memilih hidup di daerah pedalaman dulunya, dan Etnik Dayak adalah etnik Melayu yang tidak atau belum memeluk agama Islam. Oleh karenanya, istilah “masuk Melayu” ketika ada etnik Dayak yang berpindah keyakinan menjadi Islam lebih banyak dipakai ketimbang istilah “masuk Islam”.. Etnik pendatang seyogianya menyesuaikan diri dengan kerukunan kedua etnik asli tersebut.

Walaupun demikian, kemungkinan konflik terjadi masih tetap ada dikarenakan rasa keetnikan di sini masih terasa cukup tajam dalam persaingan di dunia usaha, dunia kerja, dan di pemerintahan. Rasa keetnikan yang menonjol itulah yang sebenarnya yang memunculkan perwakilan-perwakilan mereka masing-masing di pemerintahan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Memunculkan perwakilan etnik tersebut juga merupakan sumbangsih besar dari pemimpin atau tokoh etnik masing-masing.

Peran Pemimpin Etnik Dayak dan Melayu Dalam Menyelesaian Konflik Yang Terjadi Di Propinsi Kalimantan Barat

Sejak konflik sambas tahun 1999, sering terejadi perselisihan kecil antar etnik di tengah masyarakat yang sifatnya masih berupa cekcok (adu argumentasi), dan perkelahian antar individu yang berbeda etnik. Hal ini cepat diselesaikan oleh aparat keamanan dengan mengajak pemimpin atau tokoh kedua etnik. Pertikaian kecil ini masih bisa dilokalisir sebagai masalah pribadi yang kebetulan trjadi pada etnik yang berbeda. Namun tidak sedikit pula ada pihak tertentu yang mencoba untuk membawa pertikaian ini menjadi sebuah konflik etnik. Hal ini ditandai dengan munculnya para provokator yang selalu ada.

Pertikaian-pertikaian kecil tersebut terjadi karena sebab yang terkadang sangat sepele, seperti permainan olah raga dan acara hiburan, salah pengertian, saling tatap, kesenggol dalam kegiatan keramaian, saling ejek, berebut lahan pekerjaan, jual beli dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, pertikaian terbanyak

melibatkan etnik Dayak, Melayu, Madura dan Tionghoa.

Di samping pertikaian kecil, di lapangan peneliti juga menemukan banyak ekpresi ketidakpuasan terhadap suatu etnis tertentu, seperti pada etnis Tionghoa. Penguasaan lahan dan dunia usaha sering menjadi alasannya. Ekspresi ketidakpuasan ini sering dicoba dibawa ke arah pertikaian yang membawa nama etnis bahkan agama. Ekspresi ketidakpuasan ini dapat saja meningkat di masa yang akan datang jika tidak ada usaha pencegahannya. (Al-Qadrie, Syarif Ibrahim, 2003), bahkan mengatakan bahwa: konflik di Propinsi Kalimantan Barat dapat berulang tiap beberapa tahun.

Terjadinya konflik etnis selama ini di Propinsi Kalimantan Barat selama ini adalah karena pengelolaan keragaman belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena kendala ideologi; memiliki cara pandang, budaya dan cara hidup yang berbeda sehingga menimbulkan *stretotip*. Kendala struktural seperti pengelompokan etnis sehingga masing-masingnya terpisah satu dengan yang lain, dapat dilihat adanya kampung Dayak, Kampung Melayu dan kampung Madura sehingga menjadi kendala untuk berbaur.. Sementara dari sisi kendala kebijakan adalah gagalnya pemerintah membuat kebijakan untuk menjaga keseimbangan keragaman kelompok etnis tersebut. Belum ada kebijakan yang mendasar dari pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap hal ini.

Setelah terjadi suatu konflik selalu ada usaha untuk menyelesaikannya secara damai. Berbagai bentuk upaya untuk mendamaikan dilakukan, baik oleh pemimpin kelompok bersama dengan pemerintah. Aparat keamanan, tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri,

seperti yang umum terjadi adalah mediasi tradisional, yakni kesepakatan di tingkat akar rumput yang dilakukan oleh masing-masing tokoh dengan tujuan utama adalah penyelesaian apapun bentuk sengketa secara lebih dini agar tidak meluas menjadi konflik sosial. Keinginan masyarakat untuk mengakhiri konflik dapat dilihat dari berbagai indikator yang meliputi kesediaan mereka untuk saling memaafkan mengerti tolong menolong menghormati hak orang lain menerima perbedaan serta kesediaan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban sosialnya, (dalam Rusmin, 2002).

Namun terhadap konflik yang telah meluas menjadi konflik sosial dilakukan berbagai upaya, seperti yang dilakukan setelah terjadinya konflik Sambas yang menelan banyak korban nyawa dan harta. Upaya-upaya yang pernah dilakukan, antara lain: membentuk dan mengfungsikan perwakilan HAM (Hak Azasi Manusia di Kalimantan Barat, memantau serta membantu para pengungsi pasca konflik, dan melakukan berbagai mediasi di berbagai tingkatan yang sampai saat ini masih berlangsung walaupun konflik itu terjadi 20 tahun yang lalu.:

Namun adanya konflik yang berulang, terutama antara etnis Dayak, Melayu dan Madura merupakan indikasi kalau resolusi yang dilakukan tidak berhasil. Gagalnya resolusi menunjukkan ketidakmampuan pemerintah untuk menyelesaikannya. Penyelesaian tidak melihat kepada akar permasalahan dan tidak memuaskan kedua belah pihak. Seharusnya penyelesaiannya adalah *win-win solution* menuju kolaborasi, sampai pihak-pihak yang berkonflik merasa puas dan membuat komitmen bersama sehingga tidak menjadi potensi konflik di masa depan. Ketidakmampuan pemerintah ini, apakah karena pengetahuan penyelesaian

konflik yang kurang, atau adanya kemungkinan disengaja karena adanya pihak-pihak tertentu yang memperoleh keuntungan dengan adanya konflik tersebut.

Salah satu indikator yang menunjukkan bahwa usaha penyelesaian konflik belum berhasil maksimal adalah, belum bisanya etnis Madura masuk kembali ke daerah Sambas tempat dimana mereka dilahirkan dan berpenghidupan, sehingga ketika terjadi konflik (1999) mereka mengungsi meninggalkan harta benda termasuk lahan-lahan yang mereka miliki. Mungkin, tidak bisa kembalinya etnis Madura ke Sambas adalah bentuk penyelesaian yang cocok saat ini. Suatu *coolingdown* yang panjang yang berlangsung bertahun-tahun.

Meskipun kedua etnik ini, yakni Dayak dan Melayu ikut terlibat dalam pertikaian dan konflik tetapi pemimpin etnik mereka juga aktif dalam berbagai usaha mendamaikan setiap pertikaian dan konflik yang terjadi yang melibatkan etnik lain. Para pemimpin atau tokoh dari kedua etnik beserta dengan para tetua mereka akan turun tangan mendamaikan pertikaian dan konflik yang terjadi. Meskipunpun konflik yang terjadi itu melibatkan mereka sendiri, tetapi para tokoh adat akan bahu membahu untuk penyelesaian konflik.

Ketika terjadi konflik antara etnik Dayak atau Melayu dengan etnik Madura beberapa waktu yang lalu, maka tokoh-tokoh dan organisasi atau paguyuban dari kedua etnik turun tangan untuk mendamaikan dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada keluarga korban dari etnik Madura. Sampai saat ini masih terlihat bagaimana usaha tokoh etnik Dayak dan Melayu memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada anak-anak dan generasi

muda mereka untuk berlaku kondusif kepada masyarakat etnik Madura.

Pemimpin Etnik Dayak dan Melayu Menentang Pola Pengelompokan

Secara garis besar, dalam keseharian pola pengelompokan etnik dapat di bagi atas dua, yakni; a) atas dasar etnik, dan b) atas dasar agama. Walaupun dua pola pengelompokan ini ada di tengah-tengah masyarakat Kalimantan Barat, namun hal ini tidak begitu terasa dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat sudah berpikir lebih objektif dan menerima perbedaan secara terbuka.

Di tengah-tengah masyarakat perbedaan etnik dan agama tidaklah terlalu ditonjol-tonjolan. Masyarakat sudah terbiasa dengan *pluralisme*. Namun, karena masih rendahnya tingkat pendidikan dan kesenjangan kesejahteraan antara penduduk asli dengan pendatang, terutama dengan etnis Tionghoa, dapat saja menjadi pemicu konflik setiap saat. Pada saat terjadi konflik pola pengelompokan bisa saja berubah membentuk formasi baru yang bisa saja bersifat dinamis, seperti yang pernah terjadi pada peristiwa konflik Sambas, dimana yang pada mulanya konflik tersebut adalah antara etnik Melayu dengan Madura, kemudian etnik Dayak bergabung membantu Melayu atas alasan tertentu.

Jika di masa yang akan datang kembali terjadi konflik di Propinsi Kalimantan Barat, tidak tertutup kemungkinan terbentuk formasi-formasi baru dalam pengelompokan etnik. Bisa dua atau tiga etnik bergabung menjadi satu dalam menghadapi musuh-musuhnya. Sebenarnya pola pengelompokan etnik ini, jika terjadi kembali konflik di Kalimantan Barat dapat perkiraan atau prediksi dengan melihat kepada kecenderungan-

kecenderungan selama ini, dan sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan kelompok masing-masing etnik.

Jika dalam situasi normal, pola pengelompokan etnik hanya berdasarkan pada etnik dan agama, maka pada situasi konflik terjadi akan muncul formasi baru dalam pengelompokan etnik. Hal ini didasarkan pada fakta konflik-konflik sebelumnya, dimana selalu saja ada etnik yang bergabung membantu salah satu etnik yang sedang berkonflik. Hal inilah yang dapat memicu konflik menjadi semakin besar dan meluas dengan cepat.

Berdasarkan pengalaman di lapangan dan melihat kepada kecenderungan-kecenderungan selama ini, terutama persepsi para pemimpin atau tokoh etnik yang dapat mempengaruhi kelompoknya, maka dapat diprediksi bentuk formasi pengelompokan etnik jika terjadi konflik di masa yang akan datang. Formasinya (Maisondra, 2020), adalah sebagai berikut:

- a. Jika terjadi konflik antara etnik Melayu dengan salah satu etnik pendatang, maka otomatis etnik Dayak akan membantu etnik Melayu secara terang-terangan.
- b. Jika terjadi konflik antara etnik Dayak dengan salah satu etnik pendatang, maka etnik Melayu tidak secara otomatis membantu etnik Dayak, tergantung etnik mana yang menjadi lawannya.
- c. Jika terjadi konflik antara etnik Tionghoa dengan salah satu etnik manapun, akan ada beberapa etnik yang akan bergabung membantu etnik tersebut menghadapi etnik Tionghoa.
- d. Jika terjadi konflik antara sesama etnik pendatang, kecuali etnik Tionghoa, maka tidak akan ada etnik lain yang akan bergabung, kecuali salah satu etnik telah bertindak di luar batas, atau menyinggung etnik lainnya juga.

e. Konflik antara etnik Melayu dengan etnik Dayak saat ini sangat kecil kemungkinan terjadinya. Namun jika terjadi, maka akan ada etnik lain yang akan bergabung dengan masing-masing etnik bertikai, namun tidak secara terang-terangan.

Kemungkinan- kemungkinan pengelompokan etnik jika terjadi konflik di masa yang akan datang seperti prediksi di atas yang selalu diantisipasi oleh kedua pemimpin etnik Dayak dan Melayu agar jangan terjadi kembali konflik sosial berskala besar di tanah Kalimantan Barat dan sekitarnya.

KESIMPULAN

Hubungan antara etnik Dayak dan etnik Melayu sangat harmonis dan terjaga dengan baik secara turun temurun. Hal ini tidak lepas dari peran pemimpin kedua etnik/ tokoh adat dan para tetua mereka. Bukti dari keharmonisan hubungan kedua etnik ini adalah jarang terjadi pertikaian atau konflik kedua etnik. Jika terjadi pertikaian di antara anggota masyarakat kedua etnik maka para pemimpin atau tokoh adat akan segera mendamaikan perselisihan sehingga tidak berkembang menjadi konflik sosial berskala besar. Pemimpin kedua etnik, yakni etnik Dayak dan Melayu juga berperan secara aktif mendamaikan setiap perselisihan dan konflik dikalangan etnik lain sehingga tidak berdampak luas menjadi konflik sosial berskala besar. Pemimpin kedua etnik (Dayak dan Melayu), berperan dalam mencegah adanya pengelompokan-pengelompokan yang berbasis agama dan etnik, sehingga di tengah-tengah masyarakat terjadi tercipta pebauran dan keharmonisan hidup Bersama dan berdampingan.

Diharapkan pemerintah senantiasa melakukan pembinaan secara lebih nyata dan intensif kepada pemimpin etnik atau tokoh adat serta memotivasi mereka dalam menjalankan perannya menciptakan kedamaian dan keharmonisan di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah diharapkan juga membetikan perhatian khusus kepada pemimpin etnik dengan menghadirkan mereka dalam kegiatan- kegiatan penting pemerintahan sehingga kepemimpinan etnik merasa diformalkan keberadaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qadrie, Syarif Ibrahim. 1990. *Ethnicity and Social Change in Dyaknese Society of West Kalimantan*. Dissertasi untuk program doktoral di Department of Sociology, University of Kentucky, Lexington, Kentucky.
- _____. dan Thamrin dan Erdi. 1999. *Pertikaian Antara Komunitas Madura dengan Komunitas Dayak di Kawasan Pedalaman Dekat, 1996/1997, dan antara Komunitas Madura Sambas dengan Komunitas Melayu Sambas, 1998/1999 di Kalimantan Barat*. Jakarta: Yayasan-Ilmu Ilmu Sosial.
- _____. 2000. The Violent Conflicts between Dayaknese and Maduranese Communities, and Between Madurese and Sambas Malay Communities in West Kalimantan: Historical, Cultural and Economic Factors and their Contemporary Manifestations. Makalah di sampaikan pada "The International Workshop on Violence in Indonesia: Its Historical Roots and Contemporary Manifestation", diselenggarakan oleh Department of

- Language and Cultures of Southeast Asia and Oceania, Universitet Leiden, Leiden, 13 – 15 December 2000 (Al Qadrie, 2000).
- _____ 2002. “Factors in Ethnic Conflicts, Ethnic Identity and Consciousness, and the Indications of Disintegrative Process.” Dalam Murni Djamal dan Kalus Pahler (ed). *Communal Conflicts in Contemporary Indonesia*. Jakarta: The Conrad Adenauer Stiftung and The Center of Languages and Cultures, IAIN Jakarta.
- _____ 2003. Pola Pertikaian Etnis di Kalbar dan Faktor-Faktor Sosial, Ekonomi, dan Politik yang Mempengaruhinya. Dalam Nica Kana, I Made Samiana dan Pradjarta, dkk (eds). *Pluralitas Dalam Perspektif Lokal: Dinamika Politik Lokal di Indonesia*. Salatiga: Percik dan The Ford Foundation dan Oxfam.
- Avruch Kevin 2000 *Culture and Conflict Resolution* Washington DC United State Institute of Peace.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. 2020. *Provinsi Kalimantan Dalam Angka*. CV. Sembilan Sembilan.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Hermansyah. 2003. *Persaudaraan Dayak Melayu Dalam Memori Kolektif Orang Melayu*. Pontianak. Teraju, <https://teraju.id/berita/persaudaraan-dayak-melayu-dalam-memori-kolektif-orang-melayu-4454/>
- Maisondra. *Conflict Management In West Kalimantan Prediction, Ethnic Grouping Patterns When Conflicts Happened-- Palarch's Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology* 17(4), 663-673. ISSN 1567-214x : Netherlands
- Marlow, C. 2001. *Research Methods for Generalist Social Work*. Toronto: Brooks/Cole.
- Nawawi, Hadari, 1989. *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*, Jakarta : PT.
- Rusmin Tumanggor, 2002. Jaenal Aripin dan Imam Soeyoeti. *Dinamika Konflik Etnis dan Agama di Lima Wilayah Konflik Indonesia* dalam [http www depsos go id](http://www.depsos.go.id). Balitbang.
- Salim, Moch Haitami. 2012a. *Mempererat Kerukunan Etnis dan Umat Beragama dalam Tatanan Masyarakat Pluralis-Multikultur di Kalimantan Barat*. Pontianak: STAIN Pontianak Press
- Sudagung. 2001. *Mengurai Pertikaian Etnis, Migrasi Swakarsa Etnis Madura Ke Kalimantan Barat*, Jakarta : ISAI
- Schweitzer, Mary. 1994. *Harmony Ideology Works At The Mill, dalam Antropological Contribution To Conflict Resolution (Ed)*. Alvin W. Wolfe and Horgang Yang. Athens and London: The University of George Press.
- Zaidar, Zulfydar. 2009. *Mediasi Melayu – Madura*, Pontianak: Romeoa Grafika.